

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

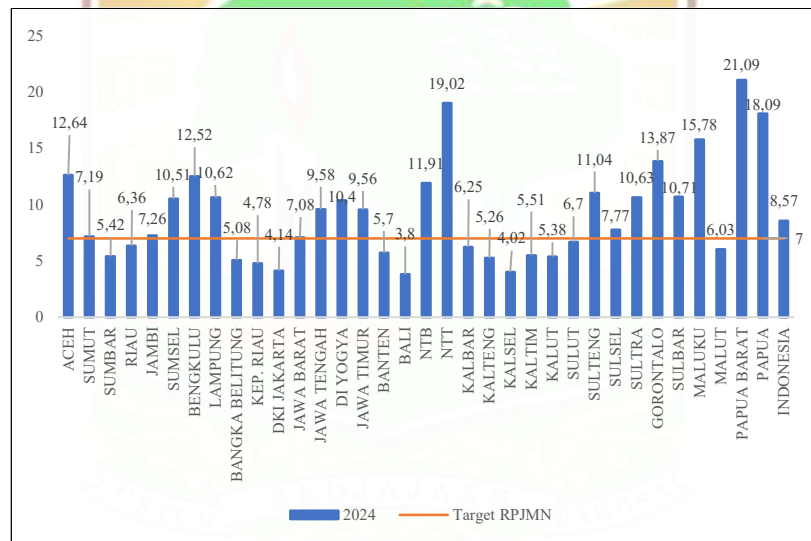
Kemiskinan merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian dan penanganan di suatu wilayah, karena dapat mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjalani standar hidup yang layak. Menurut *World Bank* (2004) kemiskinan terjadi ketika kurangnya aset dan penghasilan yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan layak. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai masalah yang serius, sehingga upaya pemberantasannya harus dilakukan baik secara individu, keluarga, daerah, masyarakat, dan antar negara.

Selama proses pembangunan ekonomi, kemiskinan tetap menjadi masalah utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan tujuan suatu negara, karena pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas ekonomi (Zhao *et al.*, 2025). Namun demikian, keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari kemampuan wilayah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam praktiknya, terdapat wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah tetapi belum didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga potensi ekonomi belum termanfaatkan secara optimal. Ketidakseimbangan kapasitas ini pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan (Rahim *et al.*, 2021).

Setiap negara selalu mencari solusi dan merancang program untuk mengatasi masalah kemiskinan (Priambodo & Djirimu, 2024). Kemiskinan tidak hanya terkait dengan pendapatan yang rendah, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu mereka bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan karena berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penurunan

tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan baik pada tingkat nasional maupun global.

Komitmen penurunan tingkat kemiskinan tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) periode 2015–2030, khususnya tujuan 1 (*No Poverty*) yang menekankan pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia (UNDP, 2015). Di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menargetkan penurunan kemiskinan kisaran 7–6% pada tahun 2024. Namun demikian, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan dan tingkat kemiskinan nasional menunjukkan kecenderungan menurun, ketimpangan tingkat kemiskinan antar provinsi masih menjadi tantangan di Indonesia seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia Tahun 2024 dengan Target RPJMN (%)

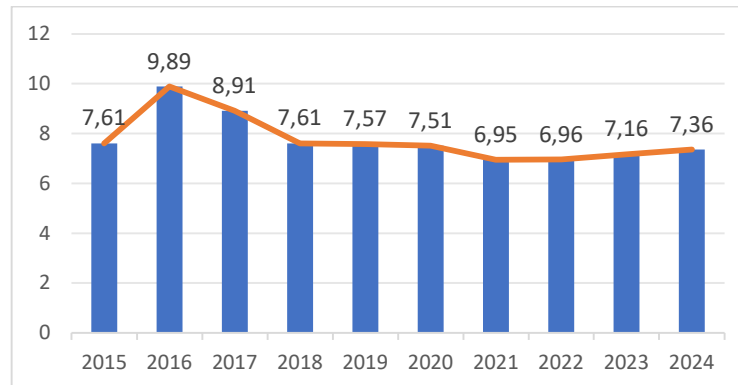
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 masih berada di atas target RPJMN 2020-2024 yaitu berada di angka 8,57% dengan jumlah orang miskin sebanyak 24,05 juta orang. Tingkat kemiskinan di beberapa provinsi jauh di atas target RPJMN, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, dan Kep. Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan

yang relatif lebih rendah bahkan berada di bawah target. Meskipun beberapa provinsi telah mencatat penurunan tingkat kemiskinan hingga tahun 2024, masih terdapat 20 provinsi (58,82%) dengan tingkat kemiskinan di atas target RPJMN sehingga capaian pengurangan kemiskinan nasional belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah.

Selain ketimpangan antar provinsi, tingkat kemiskinan di Indonesia juga memperlihatkan pola persistensi, yaitu kemiskinan cenderung bertahan dari tahun ke tahun di beberapa provinsi. Pola persistensi tersebut menyebabkan penurunan angka kemiskinan berjalan lambat dan bertahap. Akibatnya, dampak dari sebuah guncangan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berpotensi memicu lonjakan jumlah penduduk miskin di tahun berikutnya (Suryahadi *et al.*, 2020).

Tingkat kemiskinan yang persisten dan relatif tinggi di sejumlah provinsi mengindikasikan bahwa proses pengurangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh perubahan kondisi ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan setiap provinsi dalam meningkatkan daya saing masyarakat, perluasan lapangan kerja, peningkatan penghasilan. Menurut Nurkse (1957), kemiskinan terjadi karena rendahnya produktivitas dan keterbatasan modal fisik dalam kegiatan produksi yang menyebabkan pendapatan masyarakat tetap rendah. Perluasan kesempatan kerja melalui aktivitas ekonomi produktif, seperti sektor industri, dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan daya saing Anda dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut BPS (2024b), industri pengolahan memiliki nilai tambah (*value added*) paling tinggi dalam perekonomian Indonesia dengan berkontribusi sebesar 18,98%, lebih besar dari yang lain seperti sektor perdagangan besar dan eceran 13,07% dan pertanian 12,61%. Industri mikro dan kecil merupakan bagian dari sektor industri pengolahan sebagai industri padat karya memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan memiliki potensi untuk berkembang seperti yang diperlihatkan Gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Proporsi penyerapan tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil di Indonesia (Persen)
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor industri mikro dan kecil di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Puncaknya, pada tahun 2016 industri mikro dan kecil mampu menyerap sejumlah 9,89% angkatan kerja yang bekerja atau 11,71 juta jiwa tenaga kerja dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2024 dengan jumlah tenaga kerja 10,47 juta jiwa atau 7.36%. Jika dibandingkan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, terlihat adanya kecenderungan hubungan saling berkaitan antara kedua variabel. Pada periode 2019–2020, proporsi tenaga kerja IMK menurun dari 7,57% menjadi 7,51%, sementara tingkat kemiskinan meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%. Sebaliknya, pada periode 2021–2024 proporsi tenaga kerja IMK meningkat dari 6,95% menjadi 7,36% yang diikuti penurunan tingkat kemiskinan dari 9,71% menjadi 8,57%. Perubahan proporsi tenaga kerja tersebut mengindikasikan bahwa sektor IMK berpotensi menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Sektor IMK memiliki potensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh kemampuan wilayah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Agussalim *et al.* (2024) penurunan angka kemiskinan juga dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan *multiplier effect* dengan meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan, dan lapangan kerja, yang kemudian berkontribusi dalam penurunan kemiskinan (Mas'ud & Rochaida, 2022). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan merata antar provinsi.

Selanjutnya, menurut Todaro & Smith (2015) pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pembangunan kualitas hidup manusia. Menurut BPS (2020), kualitas hidup manusia diukur dari dimensi pembangunan manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi kemiskinan, di mana akses yang terbatas dapat menghambat produktivitas dan memperburuk kondisi kaum miskin (Sudirman & Sakinah, 2020). Karena kualitas pendidikan dan kesehatan yang buruk, masyarakat kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia.

Penelitian oleh Ochi (2023) menjadi rujukan penelitian ini karena memasukkan variabel *lag* kemiskinan untuk menangkap persistensi kemiskinan dari tahun ke tahun sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap variabel yang berkontribusi pada kemiskinan. Penelitian Ochi (2023) menemukan bahwa terdapat persistensi kemiskinan dari tahun ke tahun di 45 Negara Afrika, dimana tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap kemiskinan tahun sekarang karena perekonomian tidak diikuti dengan perubahan struktur sehingga negara sulit keluar dari kemiskinan. Istikomah & Taufiqqurrachman (2025) menemukan bahwa kemiskinan pada tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemiskinan tahun sekarang di Pulau Sumatera secara signifikan. Anjande *et al.* (2022) juga mengungkapkan bahwa kemiskinan memiliki siklus, dan kemiskinan memiliki pengaruh kuat dari kemiskinan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, faktor kemiskinan tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian dalam menganalisis kemiskinan.

Penelitian oleh Dhiyaa'ulhaq *et al.* (2023) juga mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Azhari *et al.* (2025) menyatakan bahwa jumlah pekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, Adam *et al.* (2023) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap jumlah tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah dimana dengan meningkatnya kemiskinan mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian, tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil perlu menjadi perhatian dalam mempengaruhi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian oleh Fatimah & Deviani (2024) membuktikan pertumbuhan ekonomi mendorong pengentasan kemiskinan secara signifikan akan tetapi terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Penelitian oleh Naufal & Fikriah (2023) menemukan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia; dalam arti lain, kemiskinan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemiskinan.

Selain itu, menurut Todaro & Smith (2015) pembangunan manusia juga berhubungan dengan kemiskinan. Temuan dari Alamsyah & Armelly (2024) mengungkapkan bahwa kualitas pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Sedangkan, penelitian oleh Abdullah & Wibowo (2024) menemukan temuan yang berbeda, bahwa pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Dzahabiyah *et al.* (2025) menemukan adanya hubungan timbal balik antara kemiskinan dengan kualitas pembangunan manusia, yang mengindikasikan adanya hubungan saling mempengaruhi.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan terbukti bahwa penelitian mengenai pengaruh tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya terhadap

tingkat kemiskinan pada tahun sekarang sudah dilakukan, akan tetapi penelitian berfokus di negara Afrika, serta pulau yang belum mampu mewakili negara secara keseluruhan. Kemudian penelitian mengenai tenaga kerja IMK, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan juga sudah dilakukan. Namun, hasilnya bervariasi, dan terdapat hubungan timbal balik antar variabel sehingga dapat menyebabkan *endogenitas* dan koefisien yang bias. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan model *Generalized Method of Moment* (GMM) yang memiliki keunggulan dapat mengatasi masalah *endogenitas* dengan judul **“Pengaruh Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hubungan dua variabel antara tingkat kemiskinan pada tahun berjalan dengan tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya, tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di Indonesia pada periode 2015–2024?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, proporsi tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan tahun berjalan di Indonesia pada periode 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis hubungan dua variabel antara tingkat kemiskinan pada tahun berjalan dengan tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya, tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di Indonesia pada periode 2015–2024.
- b. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan tahun sebelumnya, proporsi tenaga kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan tahun berjalan di Indonesia pada periode 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Penulis

Penelitian memberikan manfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis seperti analisis kuantitatif menggunakan data panel, sekaligus memperluas wawasan mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri mikro dan kecil, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia di Indonesia dalam mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini juga memberikan pengalaman yang berharga dalam melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi.

b. Pemerintah

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif dan informasi tentang bagaimana proporsi pekerja Industri Mikro dan Kecil, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan.

c. Akademisi

Penelitian bertujuan untuk memperluas literatur empiris terkait dinamika kemiskinan, terutama melalui analisis dampak dari tenaga kerja pada sektor industri mikro dan kecil yang padat karya, serta aspek pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi studi ekonomi lainnya dan sebagai acuan bagi para peneliti mendatang yang ingin menjalankan riset serupa dengan memanfaatkan rentang waktu atau pendekatan metodologis yang berbeda.